

Refleksi Pengalaman Magang dalam Memahami Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan pada BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang

**Herna Sri Nova Rahayu¹, Mitsni Salsabiila Roudli², Faninda Intan Ramadhani³,
Sabrina Nawang Candra⁴, Farah Khoirunnisa⁵, Aulia Dwi Lestari⁶
Fajar Adhitya⁷**

^{1,2,3,4,5,6} Jurusan Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Herna Sri Nova Rahayu

E-mail: hernanova960@gmail.com

Abstrak

Program magang merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman kerja secara langsung di lingkungan profesional. Artikel ini mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa akuntansi syariah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Kegiatan magang difokuskan pada pemahaman akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam berbagai aktivitas pengawasan dan pengelolaan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program magang memberikan pengalaman praktis yang signifikan bagi mahasiswa dalam memahami mekanisme pengawasan keuangan, sistem pelaporan, serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kata kunci - akuntabilitas, transparansi, magang, BPKP, Dishub Kota Semarang

Abstract

Internship programs are practical learning activities aimed at improving students' competencies through direct work experience in professional environments. This article describes the implementation of accounting student internships at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Central Java Representative Office and the Semarang City Transportation Service (Dishub). The internship activities were focused on understanding accountability and transparency in public financial management. The study uses a descriptive approach through direct observation, documentation of activities, and active student involvement in various supervisory and financial management activities. The results show that the internship program provides significant practical experience for students in understanding financial supervisory mechanisms, reporting systems, and the importance of accountability and transparency in regional government financial management.

Keywords - accountability, transparency, internship, BPKP, Semarang City Transportation Service (Dishub)

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab kepada publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik, sementara transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas segala kebijakan dan penggunaan anggaran (Ronny Gosal et al., 2016).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawas intern pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan fungsinya, BPKP melakukan audit intern, reviu laporan keuangan, evaluasi atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta pengawalan terhadap program pembangunan nasional (BPKP 2023). Di sisi lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban mengelola anggaran daerah secara tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan intern memiliki hubungan positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Lestari 2025). Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan magang di instansi pemerintah terbukti meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan yang baik (Afita 2024). Program magang di instansi pemerintah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman magang mahasiswa akuntansi di BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, serta mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh khususnya terkait pemahaman akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik dan memperkuat relevansi program magang sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman

METODE

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan magang dilaksanakan di dua instansi, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Kendal Km.12, Semarang, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang yang berlokasi di Jl. Tambak Aji Raya No.5, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang. Kegiatan magang dilaksanakan selama periode 5 Januari hingga 11 April 2026. Program magang ini merupakan bagian dari pembelajaran praktik bagi mahasiswa akuntansi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan instansi pemerintah sebagai bentuk pembelajaran praktis di luar kampus (Hoiriah 2025).

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan magang dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Uraian dari setiap tahapan kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mahasiswa melakukan orientasi terhadap lingkungan kerja di BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok instansi, sistem kerja, serta

prosedur pengelolaan keuangan yang diterapkan. Selain itu, mahasiswa mendapatkan arahan dari pembimbing lapangan mengenai tugas, tanggung jawab, serta etika kerja yang harus dipatuhi selama kegiatan magang berlangsung. Tahap persiapan ini sangat penting untuk membantu mahasiswa memahami konteks kelembagaan dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja birokrasi pemerintahan (Warno et al., 2025)

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti program magang. Pada tahap ini mahasiswa terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pengawasan dan pengelolaan keuangan di kedua instansi. Di BPKP, mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan review laporan keuangan, evaluasi SPIP, pengawalan program pemerintah, serta penyusunan dokumentasi pengawasan. Di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, mahasiswa terlibat dalam proses perencanaan anggaran, pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), verifikasi dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan SKPD. Keterlibatan langsung ini memberikan pengalaman praktis yang komprehensif mengenai implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik (Elisa Fitri Rahmawati 2023).



Gambar 1.

Penyerahan magang oleh pembimbing magang di BPKP Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.

Penyerahan magang oleh pembimbing magang di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan magang selesai dilaksanakan. Mahasiswa melakukan refleksi terhadap pengalaman yang diperoleh dan berdiskusi dengan pembimbing

lapangan mengenai pembelajaran serta keterampilan yang telah dikembangkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kompetensi mahasiswa dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program magang (Sari, Manafe, dan Elisabeth 2026).

Teknik Pengumpulan Informasi

Teknik pengumpulan informasi dalam kegiatan magang dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi kegiatan, dan diskusi dengan pegawai maupun pembimbing lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses kerja di bidang pengawasan keuangan dan pengelolaan anggaran. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data, pencatatan kegiatan harian, dan arsip dokumen relevan. Diskusi dengan pegawai dan pembimbing lapangan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur, regulasi, dan praktik akuntabilitas keuangan di instansi pemerintah (Melati 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan unit kerja BPKP yang menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. BPKP bertugas melaksanakan audit intern, revidu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, BPKP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara Dinas Perhubungan Kota Semarang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan memiliki peran utama dalam pengelolaan lalu lintas, angkutan, dan perparkiran, serta pengendalian dan penertiban transportasi guna mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Selain itu, sebagai bagian dari SKPD, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga berkewajiban mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta memanfaatkan sistem informasi manajemen daerah yang terintegrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada publik.

Pelaksanaan Kegiatan Magang

Pengalaman magang di BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan selama pelaksanaan magang diuraikan sebagai berikut.

1. Mengarsip berkas per tahun sesuai kode

Kegiatan pengarsipan dilakukan dengan mengelompokkan dokumen berdasarkan tahun dan kode klasifikasi yang telah ditetapkan oleh instansi. Proses ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyimpanan yang terstruktur dan memudahkan penelusuran dokumen ketika dibutuhkan, terutama dalam kegiatan audit atau pemeriksaan. Pengarsipan yang rapi dan sistematis ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan (Cahyadi, 2024).



Gambar 3.

Arsip berkas per tahun sesuai kode

2. Merekap berkas per tahun untuk dicek di Gudang BPKP

Rekapitulasi berkas dilakukan dengan mencatat kembali dokumen yang telah diarsipkan berdasarkan tahun untuk kemudian dicocokkan dengan kondisi fisik di gudang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan dokumen yang tersedia secara nyata. Proses ini menunjukkan adanya upaya transparansi, karena dilakukan verifikasi data secara berkala guna meminimalisir kesalahan maupun kehilangan dokumen (Noviyanti et al., 2024).



Gambar 4.

Rekap berkas untuk dicek di gudang

3. Menata berkas untuk diarsipkan dan dikelompokkan sesuai kode berkas yang tertera di amplop pink

Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan berkas berdasarkan kode yang telah tercantum pada amplop pink sebagai penanda klasifikasi dokumen. Proses penataan ini bertujuan untuk memastikan setiap berkas berada pada kelompok yang tepat sebelum dilakukan pengarsipan. Dengan adanya pengelompokan yang sesuai, pencarian dokumen menjadi lebih mudah dan sistematis. Kegiatan ini juga mendukung terciptanya tertib administrasi serta mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen ("UUD No 43" 2009)



Gambar 5.
Menata berkas untuk di arsipkan

4. Menginput saldo top up BRT ke dalam Excel buku kas umum top up dan perdana

Kegiatan ini dilakukan dengan mencatat setiap transaksi top up dan pembelian kartu perdana BRT ke dalam buku kas umum berbasis Excel. Proses pencatatan dilakukan secara teliti dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dengan benar. Hal ini penting dalam menjaga ketepatan data keuangan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi (Lisa dan Sjarief 2025).



Gambar 6.
Input saldo top up BRT ke Excel BKU

5. Rekap jumlah penumpang BRT per koridor di Excel

Penulis melakukan pengolahan data jumlah penumpang BRT berdasarkan masing-masing koridor menggunakan Microsoft Excel. Data tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat mengenai tingkat penggunaan layanan transportasi publik. Hasil rekapitulasi ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja layanan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh instansi terkait, sehingga mencerminkan bentuk akuntabilitas kepada publik (Bahrudin dan Ayunaning 2025).



Gambar 7.
Rekap jumlah penumpang

6. Menghitung setoran pendapatan BRT

Penulis melakukan perhitungan terhadap setoran pendapatan BRT berdasarkan data transaksi yang tersedia. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pendapatan yang diterima dengan data yang dicatat. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan perhitungan serta memastikan keakuratan laporan keuangan. Dengan demikian, kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap pendapatan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.



Gambar 8.
Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) di Dishub

Pengalaman dan Pembelajaran yang Diperoleh

Selama pelaksanaan magang di BPKP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, penulis memperoleh pengalaman praktis dalam memahami penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Melalui kegiatan pengarsipan, rekapitulasi data, serta pencatatan dan perhitungan transaksi keuangan, penulis memahami pentingnya ketelitian, keteraturan, dan sistem dokumentasi yang baik dalam mendukung keandalan informasi.

Selain itu, pengalaman ini memberikan pembelajaran bahwa setiap proses administratif dan operasional memiliki peran penting dalam memastikan data yang dihasilkan akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan transparan. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi tidak

hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan di instansi pemerintah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan magang yang telah dilakukan di BPKP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, dapat diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan dan administrasi tidak terlepas dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan seperti pengarsipan berkas, rekapitulasi data, hingga pencatatan transaksi keuangan merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kegiatan pengarsipan dan penataan berkas berdasarkan kode klasifikasi menunjukkan bahwa tertib administrasi menjadi faktor utama dalam menjaga keandalan informasi. Dokumen yang tersusun secara sistematis akan memudahkan proses penelusuran serta mendukung kelancaran audit dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, di mana setiap informasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, kegiatan rekapitulasi berkas dan pengecekan fisik di gudang mencerminkan adanya proses verifikasi data yang mendukung transparansi. Kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil menjadi indikator bahwa pengelolaan dokumen dilakukan secara terbuka dan dapat diuji kebenarannya. Proses ini juga berperan dalam meminimalisir kesalahan serta meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disajikan.

Dalam aspek operasional, pengolahan data jumlah penumpang BRT dan pencatatan saldo top up ke dalam buku kas umum menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data keuangan. Data yang akurat dan tersusun rapi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja layanan publik. Selain itu, kegiatan menghitung setoran pendapatan BRT memperkuat pemahaman bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat dan dihitung secara tepat untuk memastikan tidak adanya selisih atau kesalahan.

Secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan selama magang menggambarkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak hanya diterapkan pada level kebijakan, tetapi juga pada kegiatan operasional sehari-hari. Setiap proses, sekecil apa pun, memiliki kontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipercaya dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan :

Berdasarkan pengalaman magang di BPKP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan tercermin melalui berbagai kegiatan administratif dan operasional. Kegiatan seperti pengarsipan berkas, rekapitulasi data, serta pencatatan dan perhitungan transaksi keuangan menunjukkan pentingnya ketelitian, keteraturan, dan sistem yang terstruktur dalam mendukung keandalan informasi. Selain itu, pengalaman ini memberikan pemahaman bahwa setiap aktivitas dalam pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan secara terbuka. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi merupakan praktik yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pengelolaan keuangan di instansi pemerintah

Saran :

Dalam upaya meningkatkan kualitas program magang mahasiswa akuntansi di instansi pemerintah, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan materi akuntansi sektor publik dengan pengalaman praktik di instansi pemerintah secara lebih terstruktur dan sistematis. Kedua, BPKP dan instansi pemerintah lainnya diharapkan dapat memperluas program magang mahasiswa dengan

memberikan akses yang lebih luas terhadap kegiatan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang lebih kompleks dan menantang. Ketiga, diperlukan panduan yang jelas mengenai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa selama magang di instansi pemerintah, termasuk pemahaman tentang regulasi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern. Keempat, evaluasi berkala terhadap efektivitas program magang perlu dilakukan untuk memastikan relevansi dan kualitas pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta memperoleh pengalaman praktis dalam bidang pengawasan dan pengelolaan keuangan sektor publik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembimbing lapangan di kedua instansi atas arahan, bimbingan, dan kesabaran yang diberikan selama kegiatan magang berlangsung.

Apresiasi yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyusunan artikel ini, serta kepada institusi pendidikan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memfasilitasi pelaksanaan program magang sebagai bagian dari proses pembelajaran mahasiswa. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rekan magang atas kerja sama dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, H. (2024). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Penggajian Karyawan Pada PT Socfindo Seumayam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4845-4851. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8083>
- Amelia, H. L., & Hidajat, S. (2025). Pengaruh Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan Instansi Publik. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 562-573. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1699>
- Asrini, A. (2017). Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kinerja Stewardships Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Development*, 5(1), 40-54. <https://doi.org/10.53978/jd.v5i1.44>
- Bahrudin, M. A. (2025). *Evaluasi Kinerja Operasional Dan Pelayanan Bus Trans Jatim Rute Paciran-Bunder* (Doctoral dissertation, Universitas MuhammadiyahGresik).
- Devi, F. K., Apriliasari, R. D., & Sa'adah, U. (2025). Peran Program Magang Mbkm Bagi Mahasiswa Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3449-3458. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18829>
- Hafid, A., Siregar, B., & Biyanto, F. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Tekstil Skala Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekitarnya. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(3), 1586-1594. <https://doi.org/10.59086/jam.v4i3.925>
- Jusuf, R. A., Nangoi, G. B., & Tinangon, J. J. (2021). Analisis Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 2(1), 61-71.
- Lestari, A. E. (2025). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Prosedur Keuangan, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1609-1623. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1401>

- Mauliza, S., Nissa, F., & Hasibuan, M. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ikraith-Ekonomika*, 8(3), 954-963.
- Melati, D. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Magang Mahasiswa Vokasi untuk Peningkatan Kualitas Program Magang di Kampus Politeknik Jakarta Internasional. *ECo-Fin*, 6(2), 290-302. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1265>
- Muflihatun Hoiriah. (2025). Pengabdian Mahasiswa MBKM Magang Dalam Kegiatan Layanan Administrasi Umum Kepegawaian DISPARBUDPORA Kota Palangka Raya. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365–372. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i2.1587>
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Studi kasus Desa Pepelegi). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(6).
- Rahmawati, E. F. (2023). *Mewujudkan Perwakilan Bpkp Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga Layanan Pengawasan Yang Transparan, Akuntabel, Responsible, Independen Dan Terpercaya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Sari, E. P., Manafe, L. A., & Elisabeth, D. R. (2026). Efektivitas Program Magang dalam Mendukung Pencapaian Kompetensi dan Peningkatan Keterampilan (Skill) Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1. B), 202-210.
- Shabrina, N. N., Zulfa, Z., Rahayu, P., Andriyani, E. A., & Antika, D. R. (2025). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Jepara: Kajian Praktis Melalui Program Magang Mahasiswa UIN Walisongo Semarang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PAKDIMAS)*, 2(1), 1-9.